
Analisis Pengambilan Keputusan Program Situbondo Sehat Gratis (SEHATI) dalam Paradigma Rasionalitas

Bayu Aditya Ramadhani¹ @, Diaz Dwi Apriansyah² @,
M. Noer Falaq Al Amin³ @

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Negeri Surabaya

Abstract

The Situbondo Sehat Gratis (SEHATI) program is an initiative of the Situbondo government to provide access to affordable and quality health services for the lower middle class who are not covered by the national health insurance program. This study uses a rationality approach in analyzing the SEHATI program decision. The research method used is descriptive qualitative to evaluate the effectiveness and sustainability of this program. The results showed that the SEHATI program was positively assessed by the community because it facilitated access to health services. The SEHATI program is expected to continue to be a solution in reducing the gap in access to health and improving the welfare of the lower middle class in Situbondo Regency.

Keywords: *Decision Making, SEHATI Program, Rationality*

Abstrak

Program Situbondo Sehat Gratis (SEHATI) merupakan inisiatif pemerintah Kabupaten Situbondo untuk memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak tercover oleh program jaminan kesehatan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan rasionalitas dalam menganalisis keputusan program SEHATI. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi efektivitas dan keberlanjutan program ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program SEHATI dinilai positif oleh masyarakat karena mempermudah akses layanan kesehatan. Program SEHATI diharapkan dapat terus menjadi solusi dalam mengurangi kesenjangan akses kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelas menengah ke bawah di Kabupaten Situbondo.

Kata kunci: *Pengambilan Keputusan, Program SEHATI, Rasionalitas*

@ bayu.22171@mhs.unesa.ac.id

@ diaz.22183@mhs.unesa.ac.id

@ noerfalaqalamin@unesa.ac.id

1. PENDAHULUAN

Kesehatan masyarakat di Indonesia masih menjadi suatu masalah berkelanjutan. Kualitas kesehatan bagi masyarakat menengah ke bawah masih dinilai kurang karena sering kali terjadi kesenjangan dalam proses pelayanannya sehingga hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah demi mewujudkan cita-cita kesejahteraan warga negara seperti yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu aspek penting dari pembangunan nasional untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, hal ini tertuang dalam pasal 3 UU no. 36 tahun 2009.

Menyangkut dengan kesehatan, hal tersebut juga merupakan salah satu urusan yang diperhatikan oleh pemerintah dalam aspek pelayanan publik. Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam UU No.25 Tahun 2009 Pasal (1) yang menjelaskan jika pelayanan publik merupakan rangkaian aktivitas pemenuhan kebutuhan pelayanan yang dilakukan dengan berdasarkan kebutuhan publik yang diatur dalam peraturan bagi setiap warga negara atas barang/jasa maupun pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik. Apabila berkaitan dengan pelayanan kesehatan termasuk dalam kategori pelayanan yang bersifat non-komersial dan berorientasi pada pengabdian tanpa mencari keuntungan. Tujuan pelayanan kesehatan adalah untuk mencapai target dalam memuaskan harapan dan memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan menerapkan beberapa program layanan kesehatan dari lingkup nasional hingga regional dengan konsep pelayanan yang efektif berdasarkan infrastruktur, kualitas personnel, proses administrasi, dan akses pelayanannya. Melalui mutu pelayanan publik yang profesional memberikan kepuasan kepada masyarakat, terlebih lagi pada pasien yang berobat maupun yang membutuhkan pelayanan dibidang kesehatan. Liong dalam ([Susanto, 2023](#)) menyebutkan jika mutu pelayanan kesehatan merupakan derajat kesempurnaan dari pelayanan kesehatan yang sesuai dengan pelayanan kesehatan ialah standar profesi serta standar pelayanan dengan menggunakan berbagai potensi sumber daya yang ada di puskesmas maupun rumah sakit yang dilaksanakan secara wajar, efektif dan efisien, dan diberikan secara aman dan memuaskan dengan mempertimbangkan keterbatasan maupun kemampuan pemerintah dan masyarakat sebagai pelanggan. Selain itu, Rusydi dalam ([Susanto, 2023](#)) juga menyebutkan jika mutu kualitas pelayanan merupakan kemampuan instansi untuk memberikan pelayanan yang paling baik yang mutunya lebih baik dibandingkan dengan lembaga kesehatan lainnya.

Berkaitan dengan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia, dapat dikatakan jika pelayan yang diberikan masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan pelayanan yang diberikan masih berbelit-belit, banyak memakan waktu dan biaya, sehingga menyebabkan mutu pelayanan publik di Indonesia masih tidak begitu bagus ([Febriansah & Meiliza, 2020](#)). Selain itu, dikemukakan juga oleh PB IDI, Slamet Budiarto yang menyatakan jika kualitas pelayanan dibidang kesehatan masih belum berjalan dengan baik dalam aspek preventif, promotive, kuratif, SDM, logistic, rehabilitative, maupun berbagai fasilitas kesehatan yang dimiliki pada saat ini (Kemenkes RI, 2022). Masyarakat masih berharap dengan pemberian kualitas pelayanan yang tepat, cepat, murah, ramah, dan sesuai dengan kebutuhan.

Jaminan kesehatan nasional (JKN) adalah salah satu program kesehatan lingkup nasional yang diselenggarakan pemerintah sejak tahun 2014. JKN menjadi salah satu program pemerintah yang memiliki tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan

secara menyeluruh bagi publik supaya penduduk Indonesia dapat hidup sehat, sejahtera, serta produktif. Dalam JKN, manfaat yang diberikan dalam bentuk pelayanan perorangan secara menyeluruh yang mana meliputi pelayanan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, serta pemulihan yang mana di dalamnya meliputi pemberian obat-obatan serta bahan medis lainnya dengan menggunakan metode layanan terkendali biaya dan mutu (DPR RI, 2021). Sistem jaminan nasional telah ditetapkan dalam UU no. 24 tahun 2011 bahwa program jaminan tersebut diselenggarakan oleh BPJS dan bersifat wajib bagi seluruh warga Indonesia. Dalam realitanya, masih terdapat penduduk yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS. Menurut data BPJS Kesehatan pada tahun 2021, terdapat sekitar 63% dari warga Negara Indonesia yang terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 37% warga yang tidak terdaftar (Fajriah, 2021).

Menurut Chamsyah (2008) kemiskinan adalah disebabkan hubungan hubungan kompleks antara individu yang hidup dengan daya lemah dalam suatu tradisi keluarga, masyarakat dalam ruang struktur sosial (negara) yang rumit dan menganut sistem modern dalam cara produksinya. Selain itu jika menurut data yang dimiliki oleh ADB di tahun 2023, disebutkan jika 9,5% penduduk Indonesia masih berada pada taraf kemiskinan nasional pada tahun 2022 ([Sarjito, 2024](#)). Berdasarkan data tersebut juga dapat diketahui jika jutaan jiwa masih berjuang guna memenuhi kebutuhan dasarnya, yang mana dalam hal ini adalah mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih layak. Data lainnya yang dimiliki oleh BPJS di tahun 2022 di bulan September menyebutkan jika angka kemiskinan di Indonesia sebanyak 23,36 juta jiwa ([Sarjito, 2024](#)).

Melihat beberapa ironi kemiskinan yang terjadi di Indonesia, memicu terjadinya implikasi yang memperburuk pelayanan kesehatan. Sumber keuangan yang terbatas membuat masyarakat terbatas dalam mengakses pelayanan kesehatan yang krusial, sehingga menyebabkan pengobatan maupun perawatan yang tidak layak serta hasil kesehatan yang menjadi buruk. Akibatnya, masyarakat miskin yang perlu mendapatkan perawatan menjadi tidak terjangkau yang selanjutnya dapat menyebabkan kenaikan angka mortalitas serta mobilitas.

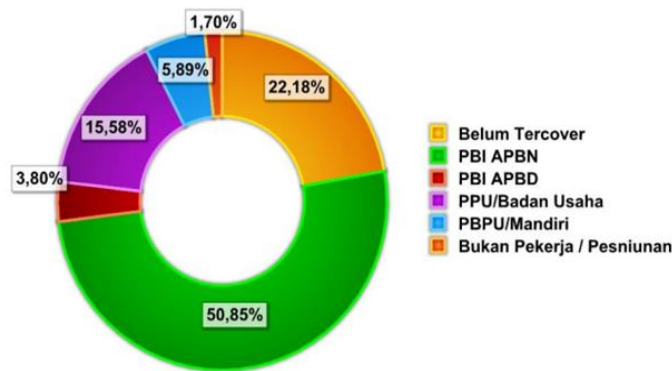
Selain itu, menurut data yang dimiliki Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mencatat ada sekitar 10,8 juta penduduk dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang belum mendapatkan akses program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. (www.cnnindonesia.com). Data tersebut terdiri dari masyarakat yang terdiri dari sistem JKN meliputi kelompok yang tidak mendapatkan manfaat dan masyarakat yang mendapatkan subsidi penuh. Berdasarkan data tersebut juga, dapat diketahui jika permasalahan JKN ini masih menjadi suatu hal yang perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah supaya masyarakat luas dapat merasakan manfaat dari JKN tersebut.

Mengacu dalam Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 28 H yaitu : Pertama, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; Kedua, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; dan Ketiga, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Dengan landasan tersebut, diterbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang salah satu inisiatif nya adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penyelenggaraan program ini bertanggung jawab oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Salah satu wilayah di Indonesia, tepatnya di Situbondo masih banyak orang yang belum memiliki BPJS, Menurut data yang dimiliki oleh BPJS juga menyebutkan jika di wilayah Situbondo di tahun 2015 masyarakat yang baru memiliki BPJS sejumlah 309.211 orang, yang dibagi sebanyak 17.248 orang merupakan pemilik BPJS non PBI dan sebanyak 251.822 pemilik BPJS PBI, serta sebanyak 6.083 jiwa orang yang memiliki BPJS mandiri (Christiana et al., 2016).

Peserta jaminan kesehatan di Kabupaten Situbondo sebagian besar adalah peserta PBI APBN, yakni sebesar 50.85%, kemudian Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Badan Usaha yang terdiri dari PNS/TNI/POLRI, Swasta dan BP/PP/VETERAN sebesar 15,58%, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) / mandiri sebesar 5,89% dan PBPU dengan iuran yang dibayarkan dengan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sebesar 3,8% dan peserta Bukan Pekerja/BP sebesar 1,7 % sampai dengan tahun 2020 jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Situbondo menurut data yang dilaporkan sebanyak 533.387 jiwa atau mencapai 77,8%. Dengan demikian masih ada 22,2% penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan. Adapun cakupan kepemilikan Jaminan Kesehatan Penduduk di Kabupaten Situbondo Tahun 2020 sebagai berikut:

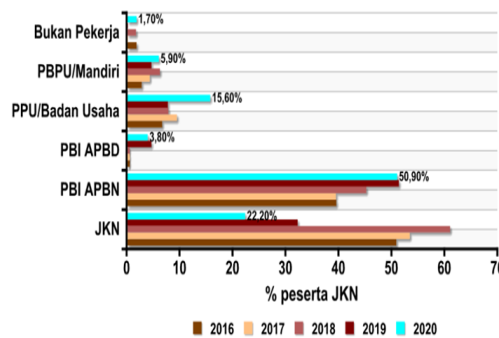
Gambar. 1



Sumber: BPJS Kesehatan kantor Situbondo

Selama lima tahun terakhir jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan seperti terlihat pada Gambar berikut.

Gambar. 2



Sumber: Sumber: Seksi Pembiayaan Kesehatan

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat peningkatan jumlah penduduk yang tercover oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Situbondo dari tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun 2015, sekitar 47,24% penduduk sudah tercover, kemudian meningkat menjadi 50,75% pada tahun 2016, 53,29% pada tahun 2017, 60,91% pada tahun 2018, dan 67,9% pada tahun 2019. Kepesertaan dalam JKN merupakan indikator penting untuk kemandirian masyarakat dalam hal kesehatan dan mencerminkan keberhasilan pembangunan kesehatan yang merata dan berkeadilan. Meskipun terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, pada tahun 2019, hanya 67,9% penduduk Kabupaten Situbondo yang tercover oleh JKN. Hal ini menunjukkan bahwa target pencapaian Universal Health Coverage (UHC), di mana minimal 95% total penduduk sudah menjadi peserta JKN pada tahun 2019, belum tercapai. Pada tahun 2020, cakupan JKN di Kabupaten Situbondo baru mencapai 77,8% penduduk, masih jauh dari target yang ditetapkan. (DINAS KESEHATAN KAB. SITUBONDO, 2020)

Jika melihat data yang telah dipaparkan tersebut, akan memberikan dampak yang kurang baik bagi dua pihak yang aman dalam hal ini peserta BPJS maupun pihak BPJS. Hal tersebut dikarenakan masyarakat di tahun tersebut mayoritas memiliki BPJS mandiri, sehingga jika terjadi penunggakan maka pihak BPJS akan memiliki dampak. Dampak tersebut yakni sulitnya mengatur efisiensi dana. Penunggakan pembayaran ini umumnya bisa dipengaruhi oleh faktor ekonomi.

Selain itu masih timbul permasalahan mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yakni kurangnya intensitas pengawasan dalam pelayanan masyarakat yang sudah memiliki BPJS tersebut di Kabupaten Situbondo. Pada tahun 2017, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdoer Rahem kabupaten Situbondo Jawa Timur berkali-kali menolak pasien miskin yang ternyata memiliki BPJS. (www.majalah-gempur.com). Sedangkan apabila mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal yang berkaitan dengan kesehatan adalah urusan pemerintahan yang kemudian dibagi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah/Kota dan memiliki sifat wajib. Hal tersebut dikarenakan berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab dalam aspek pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan ([Susanto, 2023](#)).

Dari permasalahan yang ada, Pemerintah Kabupaten Situbondo menerapkan program Situbondo Sehat Gratis yang selanjutnya disingkat SEHATI sejak tahun 2021. Program ini dilakukan dengan asas kemanusiaan, keadilan, serta manfaat bagi seluruh rakyat. Adanya program tersebut sebagai alternatif yang ditujukan terhadap masyarakat Situbondo kelas menengah kebawah yang tidak terjangkau program jaminan kesehatan nasional dengan berbasis KTP elektronik agar tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit yang bekerja sama.

Lebih lengkapnya, dalam peraturan juga disebutkan jika sasaran dari program tersebut dibedakan menjadi 4 kategori ([Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2021](#) Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Dalam Program Situbondo Sehat Gratis Di Kabupaten Situbondo, 2021). Pertama, penduduk miskin yang mempunyai KTP-el yang sudah didata maupun yang tidak terdata dalam DTKS maupun yang tidak memiliki JKN atau dalam proses integrasi dalam Program JKN. Kedua, peserta PBI yang mempunyai kartu tidak aktif yang tidak terdata dalam DTKS tetapi termasuk kedalam penduduk miskin. Ketiga, Neonatus yang membutuhkan rujukan maupun tindakan yang berumur 28 hari serta ibu nifas 42 hari yang berasal dari keluarga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Keempat, santri serta anak-

anak penghuni Panti Asuhan yang berada di wilayah tersebut serta terdata sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Situbondo.

Sumber anggaran program ini didapatkan dari APBD Kabupaten Situbondo dan menjadi salah satu program prioritas dari pemerintah Kabupaten Situbondo. Anggaran yang dimiliki tersebut dipergunakan untuk membiayai beberapa pelayanan di bidang kesehatan seperti pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat inap, ambulance, pelayanan kesehatan rawat jalan, obat-obatan, transfusi darah, rawat sehari, serta penunjang diagnostic. Program tersebut mendapat penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas dengan kategori “Peduli Pelayanan Publik” pada acara HUT Kompas TV tanggal 11 September 2023 lalu. Prestasi tersebut diraih lantaran program SEHATI dinilai berhasil memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dirasakan langsung manfaatnya sehingga masyarakat puas terhadap kinerja pemerintah ([Feriyanto, 2023](#))

Bahwa dengan adanya kebijakan ini sebagai inovasi baru dalam mencapai cita-cita bangsa dalam kesejahteraan melalui bidang kesehatan, ironi-ironi yang saat ini terjadi seperti masyarakat menengah ke bawah masih belum terjangkau oleh jaminan kesehatan nasional dapat terselamatkan dengan program SEHATI, paradigma rasionalitas dalam permasalahan ini yakni ada dalam esensi terwujudnya jangkauan dalam skala luas yang selama ini menjadi ironi di negeri ini, karena pada dasarnya masyarakat Indonesia memiliki kesamaan hak memiliki kehidupan yang layak, hingga kebijakan-kebijakan seperti inilah yang menjadi penyelamat atas terhambatnya pelayanan kesehatan gratis yang selama ini memiliki hambatan terkait jangkauan, oleh karena itu dalam penelitian ini akan berfokus pada konsep dalam paradigma rasionalitas yang akan mengupas secara luas mengenai kelayakan kebijakan dalam mengatasi problematika yang selama ini menjadi ironi.

2. METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Yang mana pada penelitian ini merupakan metode yang dihasilkan dari studi literatur dengan mengumpulkan jurnal yang relevan serta laporan, dokumen, naskah, dan catatan resmi. Serta Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai fenomena tentang program Situbondo Sehat Gratis. Kemudian dengan pendekatan deskriptif yang dituangkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah yang berbeda serta dapat menggali data informasi lebih dalam lagi tentang fenomena tersebut dengan menggunakan penelitian kualitatif. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan rasionalitas untuk mengetahui konsep pengambilan keputusan dalam kebijakan Program Situbondo Sehat Gratis (SEHATI).

Konsep rasionalitas dapat dipahami dalam dua konteks. Pertama, sebagai sebuah tindakan yang dianggap tepat jika menghasilkan hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yang bisa diukur dari pencapaian tujuan. Ini dikenal sebagai rasionalitas instrumental. Kedua, sebagai keyakinan individu yang didukung oleh bukti terbaik yang tersedia, yang disebut epistemic rationality. Rasionalitas instrumental yang dikemukakan oleh Weber menjelaskan jika pengambilan keputusan didasarkan atas pertimbangan serta pilihan sadar yang memiliki keterkaitan dengan tujuan atas keputusan dan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan melalui pertimbangan yang rasional ([Febriansah & Meiliza, 2020](#)). Sedangkan rasional epistemic ini lebih menekankan pada penilaian, berbeda dengan rasional instrumental yang memiliki kaitan dengan pengambilan keputusan.

[Hastie dan Dawes \(2010\)](#) mengungkapkan bahwa sebuah tindakan dianggap rasional jika memenuhi empat kriteria kunci (Miftahul Khair, 2020) :

1. Pengambil keputusan harus melakukan pertimbangan menyeluruh terhadap semua alternatif yang tersedia. Ini berarti mempertimbangkan semua kemungkinan yang ada sebelum membuat keputusan.
2. Pemilihan alternatif harus didasarkan pada pertimbangan terhadap konsekuensi atau hasil dari setiap alternatif. Alternatif dipilih jika menghasilkan hasil terbaik atau tertinggi untuk pengambil keputusan.
3. Ketika hasil atau konsekuensi belum pasti, nilai dari hasil tersebut harus diperkirakan dengan mempertimbangkan ketidakpastian menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan teori probabilitas.
4. Dalam proses pengambilan keputusan, perlu merepresentasikan pertimbangan yang menyeluruh terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan terkait hasil dari tindakan tersebut, sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai melalui tindakan tersebut.

Sebuah keputusan bisa dianggap rasional apabila kerangka alternatif keputusan dipilih guna mencapai tujuan yang akan dicapai. Dalam pengambilan sebuah keputusan, rasionalitas memberikan bobot pada beberapa alternatif keputusan yang ditentukan. Kemudian diantara beberapa alternatif akan dipilih satu alternatif yang memiliki bobot terbesar berdasarkan analisis rasional, untuk itu rasionalitas merupakan suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan data pendukung yang valid. Dengan demikian, maka diketahui jika dalam pengambilan keputusan rasional yang dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan pengujian segala alternatif yang ada guna memberikan output yang maksimal dengan upaya yang dikeluarkan seminimal mungkin.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengambilan keputusan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk merumuskan dan menentukan beberapa pilihan alternatif sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi guna mencapai tujuan yang dikehendaki. Pengambilan keputusan adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan terdapat tujuh langkah yang harus diperhatikan sebagaimana yang dikutip dalam ([Febriansah & Meiliza, 2020](#)).

1. Memahami dan menyatakan dasar permasalahan. Dalam fase ini, terdapat dua fase yang dilalui. Fase yang pertama adalah dilakukannya pengujian hubungan antara sebab dan akibat. Fase kedua, dilakukannya analisis perubahan maupun penyimpangan normal dalam suatu permasalahan yang sedang berlangsung.
2. Mencari dan memproses data analisis secara signifikan. Dalam langkah ini, terdapat dua tahapan yang dilakukan. Tahapan pertama, adalah melakukan penetapan data serta informasi apa saja yang diperlukan pada saat melakukan perumusan keputusan yang akurat. Tahapan kedua, memberikan kepastian jika data serta informasi tersebut diperoleh dengan tepat waktu serta relevan.
3. Mengembangkan solusi alternatif. Kecenderungan untuk menerima solusi alternatif keputusan yang dapat dilakukan akan bermanfaat meminimalkan terjadinya kegagalan pada saat pencapaian serta penyelesaian secara optimal. Penekanan dalam langkah ini berkaitan dengan kemampuan dalam menentukan solusi alternatif yang secara keseluruhan dapat menyelesaikan permasalahan, meskipun pilihan yang diambil tersebut bukanlah pilihan yang ideal.

4. Melakukan alternatif solusi. Setelah menyatakan beberapa alternatif solusi, maka penting juga untuk melakukan evaluasi dari berbagai alternatif yang ada tersebut. Tujuan dilakukannya evaluasi yakni guna melakukan penilaian bagaimana efektifitas dari berbagai alternatif solusi yang ada.
5. Memilih alternatif solusi paling baik. Pada tahapan ini, alternatif yang diambil harus berdasarkan pada kemampuan pemimpin dalam menghadapi berbagai konsekuensi yang akan terjadi sesudah penerapan dari alternatif tersebut dipilih.
6. Penerapan keputusan. Setelah solusi ditentukan, maka tahapan yang harus dilakukan adalah merencanakan guna meminimalisir terjadinya masalah yang dapat muncul pada penerapan keputusan. Selain itu hal krusial lainnya yang wajib dilakukan yakni adanya proses pelaporan kemajuan dalam jangka waktu tertentu dan melakukan penyusunan berbagai tindakan pencegahan jika timbul penyimpangan dari penerapan keputusan tersebut.
7. Mengevaluasi perolehan keputusan. Dalam tahapan ini, dilakukannya penilaian apakah implementasi sudah dilakukan dengan baik serta keputusan mendapatkan tujuan dan hasil yang ditetapkan.

Selain itu, lebih lanjutnya menurut Eti Rochaety terdapat lima faktor yang dapat memberikan pengaruhnya dalam pengambilan keputusan seperti yang dikutip dalam ([Mahanum, 2021](#)).

1. Kedudukan. Dalam pengambilan keputusan, kedudukan dapat memberikan penentuan peran sebagai penentu, pembuat, atau hanya pegawai saja. Hal tersebut berkaitan dengan penentuan strategi teknis lainnya yang akan digunakan.
2. Masalah. Masalah atau issue memiliki tingkatan yang berbeda. Penyebab yang menjadi pemicu juga banyak jenisnya. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan yang dipilih berdasarkan tingkat permasalahan yang sedang dialami.
3. Situasi. Dalam poin ini yang dimaksud adalah keberagaman fenomena yang terjadi serta hal yang memberikan pengaruhnya terhadap tindakan seseorang. Maka, dalam pengambilan keputusan harus benar-benar detail dalam mengambil sebuah keputusan.
4. Kondisi. Dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan yang ditunjang dengan kondisi dalam sebuah keputusan. Hal ini bisa dicontohkan dengan jika pengambilan keputusan dilakukan saat sedang emosional maka hasil keputusan yang diberikan cenderung tidak optimal.
5. Tujuan. Dalam hal ini berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan tentunya sudah ditentukan. Oleh karenanya, pengambilan keputusan akan diambil dengan setepat mungkin.

Program SEHATI merupakan inisiatif penting dan sangat berharga yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Program ini menjadi penting karenakelompok khusus ini saat ini tidak tercakup oleh program jaminan kesehatan nasional (JKN), yang membatasi akses mereka ke layanan kesehatan berkualitas. Fokus utama dari program tersebut untuk mengatasi masalah ini dengan menyediakan layanan kesehatan berkualitas kepada populasi sasaran sambil mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan dampak keseluruhan terhadap masyarakat.

Program tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Situbondo mendapatkan akses terjamin ke layanan kesehatan, menegakkan standar pelayanan kesehatan yang sesuai, serta mengelola alokasi anggaran dengan transparan dan akuntabel. Di bawah program ini, biaya untuk layanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di PUSKESMAS akan ditanggung sepenuhnya. Untuk layanan di RSUD, biaya perawatan di ruang kelas III akan ditanggung hingga maksimal Rp. 10.000.000. Sementara itu, biaya layanan di RS di luar daerah akan ditanggung sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati (dinkes.situbondokab.go.id).

Penerapan program ini dinilai positif bagi masyarakat situbondo yang pernah merasakan program ini. Salah satunya yang diikutip dalam laman berita (Memo Indonesia, 2022) masyarakat yang bernama Umi Yani menyatakan dirinya mengantarkan ibunya untuk rawat inap di rumah sakit, dan dirinya merasa jika alur pendaftaran cukup mudah. Lebih lanjut, dirinya merasa jika adanya Program SEHATI ini mempermudah masyarakat yang tidak memiliki BPJS maupun KIS. Bahkan, yang menjadi poin pentingnya adalah tidak adanya pungli dalam akses pelayanan ini. Jadi dapat dikatakan jika urgensi dari adanya program ini adalah masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki BPJS sehingga membuat munculnya permasalahan terutama dibidang pelayanan kesehatan.

Paradigma rasionalitas program dirancang dengan cermat untuk memprioritaskan kebutuhan populasi sasaran. Desain program mencakup penilaian menyeluruh terhadap persyaratan perawatan kesehatan dari bagian masyarakat ini, serta analisis sumber daya yang tersedia dan kemungkinan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan strategis, pengambilan keputusan pemerintah Kabupaten Situbondo pada program SEHATI dalam paradigma rasionalitas meliputi :

1. Rasionalitas Instrumental

Rasionalitas instrumental merupakan suatu tindakan tertinggi yang didalamnya meliputi pertimbangan serta pilihan yang sadar dan memiliki keterkaitan dengan tujuan dari tindakan tersebut dan sebagai alat yang digunakan supaya dapat mencapai tujuan tersebut ([Raharja & Handoyo, 2014](#)). Secara teori tindakan sosial juga memberikan penjelasan bahwasannya tindakan yang dilakukan orang individu pada aspek hubungan sosialnya tidak lepas atas pemikiran maupun makna subyektif yang dibuat oleh individu lainnya. Intinya dalam teori rasional instrumental ini menekankan pada pengambilan keputusan yang efektif dan efisien dari berbagai opsi alternatif yang ada. Konsep rasionalitas instrumental adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan pemilihan tindakan alternatif yang akan menghasilkan hasil terbaik bagi pembuat keputusan. Dalam konteks program SEHATI, pemerintah Kabupaten Situbondo telah mengevaluasi secara cermat berbagai opsi untuk memastikan tersedianya layanan kesehatan berkualitas tinggi bagi mereka yang tidak terjangkau oleh program JKN.

Program SEHATI adalah inisiatif yang sangat dibutuhkan yang memastikan bahwa setiap orang, terlepas dari status keuangan atau sosial mereka, memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas. Pemerintah telah mengambil inisiatif ini untuk memberikan akses yang adil ke layanan kesehatan kepada populasi yang lebih luas, terutama mereka yang tidak mampu membayar biaya perawatan kesehatan. Tujuan program ini adalah untuk memberikan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas tinggi kepada mereka yang tinggal di Kabupaten Situbondo, yang tidak tercakup oleh program JKN. Implementasi program SEHATI melibatkan penguatan kapasitas fasilitas kesehatan lokal, melengkapi mereka dengan infrastruktur dan sumber daya manusia yang

diperlukan untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas. Melalui program SEHATI, individu dapat memperoleh akses ke layanan kesehatan yang sejalan dengan standar fasilitas kesehatan yang ditetapkan, melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah atau rumah sakit. Program ini merupakan pendekatan efektif yang menghilangkan kebutuhan individu untuk menjadi peserta JKN untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Program ini merupakan langkah menuju pencapaian cakupan kesehatan universal, yang merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Dengan menyediakan layanan kesehatan penting untuk semua, pemerintah memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam mengejar kehidupan yang sehat. Program SEHATI adalah upaya terpuji untuk menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan dapat diakses oleh semua orang. Dengan adanya program ini, merupakan salah satu wujud dari komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian jika kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia, bukan hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki kemampuan secara finansial. Selain itu, pelayanan kesehatan juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah sebagai pelayan publik. Melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang mudah dan memiliki mutu yang baik, program ini dapat menyediakan kebutuhan kesehatan bagi kaum rentan, yang mana dalam hal ini adalah individu yang tidak mengikuti program JKN. Kesuksesan program ini juga sangat krusial guna mencapai kesehatan universal yang menjadi tumpuan masyarakat yang sehat dan adil.

Oleh karena itu, program SEHATI menjadi salah satu inisiatif krusial dalam mengatasi kebutuhan masyarakat dalam aspek pelayanan kesehatan dari populasi paling rentan di Kabupaten Situbondo. Program ini berfokus menyediakan layanan kesehatan yang mudah diakses serta memiliki mutu yang baik yang menjadi salah satu langkah menggapai cakupan kesehatan yang universal yang diketahui sudah menjadi hak asasi manusia secara fundamental. Kesuksesan program ini sangat krusial dalam memberikan kepastian apabila semua orang memiliki akses dalam bidang pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi finansial dan status sosial pada setiap individu.

2. Pertimbangan Konsekuensi

Mempertimbangkan konsekuensi potensial yang timbul dari berbagai tindakan adalah hal yang krusial dalam membuat keputusan. Dalam pertimbangan konsekuensi ini, pengambilan keputusan dilakukan berbagai konsekuensi logis yang timbul dari setiap pilihan sebelum menetapkan keputusan. Konsekuensi tersebut dapat berupa kegagalan atau berhasilnya dari penetapan keputusan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, butuh pertimbangan yang akurat sebelum menetapkan sebuah keputusan.

Dalam konteks ini, program SEHATI telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan spesifik masyarakat Situbondo kelas menengah ke bawah, yang tidak memiliki akses ke program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program SEHATI bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan memberikan akses layanan kesehatan yang diperlukan. Dalam program ini, terdapat beberapa pertimbangan secara mendalam perihal berbagai dampak yang kemungkinan muncul dalam berbagai aspek. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan aspek ekonomi, politik, dan sosial. Berbagai pihak yang memiliki keterkaitan telah memberikan pertimbangan mengenai skenario serta permasalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya. Untuk mengurangi kesenjangan yang ada, pemerintahan setempat telah melakukan berbagai perhitungan berbagai sumber daya yang digunakan meliputi finansial, maupun infrastruktur yang mendukung program tersebut. Pemerintah

telah mempertimbangkan bagaimana program ini akan berhubungan dengan sistem kesehatan yang sudah ada sebelumnya.

Program SEHATI berfokus pada pengurangan kesenjangan dalam perawatan kesehatan dengan menyediakan layanan kesehatan berkualitas kepada anggota masyarakat yang tidak memiliki akses ke sana. Program ini menawarkan berbagai layanan kesehatan, termasuk perawatan pencegahan, perawatan primer, layanan diagnostik, dan perawatan darurat. Dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat untuk pemberian layanan kesehatan, di mana penyedia layanan kesehatan bekerja sama dengan anggota masyarakat untuk memastikan bahwa mereka menerima perawatan yang mereka butuhkan. SEHATI dirancang untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Situbondo.

Oleh karena itu, program SEHATI tidak hanya sebagai inisiatif kesehatan, melainkan perwujudan dari keputusan yang matang dan kesadaran akan konsekuensi dan dampaknya. Pada proses pengambilan keputusan, para stakeholder juga bersikap peka pada dinamika sosial serta apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang terus berubah seiring dengan perkembangan, sehingga program ini dapat terus relevan serta efektif dalam pemenuhan berbagai tuntutan kesehatan yang ada di wilayah tersebut.

3. Penilaian Terhadap Ketidakpastian

Ketidakpastian merupakan suatu bentuk dari adanya kekurangan informasi mengenai keputusan serta aksi dari individu pada saat ini terhadap tujuan yang ingin dicapai pada masa depan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, maka diperlukan probabilitas yang memberikan kemungkinan maupun peluang suatu hal yang dinilai tidak pasti. Ketidakpastian ini meliputi berbagai faktor salah satunya dapat dilihat dari tingkat efektivitas jangka panjang dari upaya yang telah dilakukan dalam program tersebut. Dalam keadaan dimana hasil dari tindakan tertentu belum diketahui, perlu dilakukan evaluasi tingkat ketidakpastian yang terkait. Program SEHATI yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan masyarakat kemungkinan menghadapi ketidakpastian mengenai keterlibatan masyarakat dan efektivitas program jangka panjang. Ketidakpastian ini dapat muncul karena berbagai faktor seperti kurangnya partisipasi, dana yang tidak mencukupi, atau kejadian yang tidak terduga.

Pemerintah kabupaten Situbondo dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola program ini dengan memanfaatkan semua data dan informasi yang tersedia. Hal ini mencakup analisis tren masa lalu, memeriksa umpan balik masyarakat, dan mempertimbangkan kemungkinan berbagai hasil. Dengan demikian, pemerintah dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang potensi risiko dan manfaat yang terkait dengan program ini.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa pemerintah kabupaten Situbondo juga dapat mengurangi ketidakpastian dengan mengadopsi pendekatan yang fleksibel. Ini dapat melibatkan penyesuaian pada program sesuai kebutuhan, berdasarkan keadaan yang muncul. Dengan cara ini, pemerintah dapat memastikan bahwa program tersebut tetap efektif dalam mencapai tujuannya sekaligus mengatasi kekhawatiran masyarakat.

Dengan mengevaluasi ketidakpastian dan memanfaatkan semua data dan informasi yang tersedia, pemerintah kabupaten Situbondo dapat membuat keputusan yang tepat dalam mengelola program SEHATI. Pendekatan ini dapat membantu pemerintah membuat keputusan yang terinformasi dengan baik berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap semua potensi risiko dan manfaat, dan pada akhirnya mengarah pada hasil yang lebih baik bagi masyarakat.

4. Pertimbangan Terhadap Tujuan

Pertimbangan terhadap tujuan merupakan tahapan krusial dalam pengambilan keputusan, terutama pada konteks program ini. Ketika dihadapkan dengan keputusan, sangat penting untuk mendekati mereka dengan rasionalitas dan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai. Dalam kasus program SEHATI, tujuan utamanya adalah untuk menyediakan layanan kesehatan yang mudah diakses dan terjangkau bagi kelas menengah ke bawah, yang sering dikecualikan dari akses JKN (program jaminan kesehatan nasional Indonesia). Program SEHATI dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat individu yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk mencapai perawatan kesehatan secara mandiri, seperti mereka yang kurang mampu atau hidup dalam kemiskinan.

Melalui program SEHATI, berbagai layanan kesehatan ditawarkan kepada kelas menengah ke bawah, antara lain layanan kesehatan preventif dan kuratif, layanan kesehatan ibu dan anak, serta layanan keluarga berencana. Dengan menyediakan layanan ini, program SEHATI berusaha untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan individu secara keseluruhan, menjamin bahwa mereka menikmati kesempatan yang sama untuk menjalani hidup sehat seperti orang lain.

Program SEHATI adalah inisiatif yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan dalam layanan kesehatan untuk kelas menengah ke bawah, memastikan bahwa mereka tidak tertinggal dalam mencari masyarakat yang sehat. Dengan melaksanakan program ini, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai cakupan kesehatan universal dan mengurangi kesenjangan kesehatan. Program SEHATI merupakan langkah signifikan untuk mencapai tujuan ini, memungkinkan individu untuk mengakses layanan kesehatan berkualitas dan mempromosikan masyarakat yang lebih sehat.

Oleh karena itu, program SEHATI menjadi manifestasi komitmen pemerintah Kabupaten Situbondo atas pelayanan kesehatan guna mencapai kesenjangan dalam kesehatan. Program ini juga sebagai wujud strategis dalam membangun masyarakat yang lebih sehat secara keseluruhan, melalui pemberian pelayanan yang adil serta setara dan tentunya tetap mempertahankan mutu yang baik.

4. KESIMPULAN

Program Situbondo Sehat Gratis (SEHATI) adalah inisiatif yang dibuat dengan baik, menunjukkan bagaimana pengambilan keputusan yang rasional dapat meningkatkan akses ke layanan kesehatan bagi orang-orang terpinggirkan yang membutuhkan. Program ini juga memiliki tujuan memberikan jaminan bagi masyarakat miskin dengan tetap memperhatikan pemberian pelayanan yang berkualitas dengan pengelolaan alokasi anggaran yang transparan dan akuntabel. Program SEHATI diberlakukan sejak tahun 2021 disahkan melalui regulasi. Program ini muncul dikarenakan adanya masalah kesehatan yang masih tidak bisa diakses oleh masyarakat situbondo dikarenakan masalah finansial. Banyak masyarakat yang tidak memiliki BPJS untuk berobat sehingga berdampak pada kesehatan masyarakat yang menjadi terbengkalai.

Masalah yang muncul tersebut menjadi latar belakang pemerintah menetapkan program ini dengan mengambil pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti alternatif tindakan, konsekuensi, ketidakpastian, dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam seluruh poin pembahasan tersebut, menekankan pada efektivitas serta efisiensi dalam pengambilan keputusan serta pemikiran secara mendalam perihal berbagai dampak yang muncul dari program tersebut.

Berdasarkan penelitian juga disebutkan jika Bupati Situbondo telah berhasil mengelola program ini secara efisien dan efektif. Akibatnya, program SEHATI tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan masyarakat Situbondo, tetapi juga membantu menjembatani kesenjangan dalam akses ke layanan kesehatan bagi mereka yang sebelumnya mungkin tertinggal. Dengan demikian, program ini dapat dikatakan sebagai program yang krusial yang mampu mengatasi kebutuhan pelayanan kesehatan yang berasal dari berbagai kelompok rentan yang ada di wilayah tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan menekankan pada berbagai pengetahuan dan pertimbangan yang matang.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Mahanum. (2021). Pengambilan Keputusan Dan Perencanaan Kebijakan. Pendidikan Dan Ilmu Pendidikan, 6(2), 154–163. <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/sabilarrasyad>
- Sarjito, A. (2024). Dampak Kemiskinan terhadap Akses Pelayanan Kesehatan di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Pemerintahan, 13(1), 397–416.
- Susanto, H. (2023). Kualitas Pelayanan Puskesmas Asembagus Dan Kepuasan Pasien Di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. Action: Jurnal Ilmiah, 19(17–29).

Buku

- Christiana, I., Masroni, & Tyas, E. W. (2016). Hubungan Sosial Ekonomi, Tingkat Pendidikan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran Premi Bpjs Kesehatan Oleh Peserta Bpjs Kesehatan Mandiri Di Puskesmas Mlandingan Kabupaten Situbondo. Healthy, 5(1), 15–32.
- Febriansah, R. E., & Meiliza, D. R. (2020). Teori Pengambilan Keputusan. In Umsida Press Sidoarjo Universitas (Vol. 1, Issue 1). UMSIDA Press.
- Feriyanto, I. (2023). Program Sehati Pemkab Situbondo Sabet Penghargaan Nasional, Piala Diserahkan Kemenpan-RB Abdullah Azwar Anas. Situbondo: Jawa Pos.
- Hastie, R., & Dawes, R.M. (2010). Rational Choice in an Uncertain World: The Psychology of Judgment and Decision Making. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Dalam Program Situbondo Sehat Gratis Di Kabupaten Situbondo, (2021).
- Raharja, S. I., & Handoyo, P. (2014). Rasionalitas Mengikuti Seni Beladiri Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Ranting Pengkok , Padangan , Bojonegoro. Paradigma, 2(3), 1–8.

Artikel Dari Internet

- DINAS KESEHATAN KAB. SITUBONDO. (2020). PROFIL KESEHATAN KAB. SITUBONDO TAHUN 2020. Retrieved from <https://dinkes.situbondokab.go.id/dinkes/backend/uploads/f012dbeefad2488722174d3b6421593c.pdf>
- DPR RI. (2021). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/kamus/file/kamus-43.pdf>

- Fajriah, O. S. (2021). Kualitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/oryzasativalailatulfajriah2815/60790bd48ede48456876e013/kualitas-pelayanan-kesehatan-di-indonesia>
- Kemendes RI. (2022). Perbaikan Kualitas Pelayanan Kesehatan Lewat RUU Kesehatan. <https://partisipasisehat.kemkes.go.id/topik/detail/0c2f3368-6e43-4a04-8190-d0e3fde0660b#:~:text=Wakil Ketua I Pengurus Besar,agar masyarakat sehat%2C%22ujarnya>.
- Memo Indonesia. (2022). Program Sehati, Di Mata Masyarakat Situbondo. <https://memoindonesia.com/kesehatan/program-sehati-di-mata-masyarakat-situbondo/>
- Miftahul Khair ,(2020). Rasional dan Model Dalam Pengambilan Keputusan. <https://syakal.iainkediri.ac.id/rasionalitas-dan-model-dalam-pengambilan-keputusan/>